

KATA PENGANTAR

REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Training on Textbooks Development* dan *Workshop on Textbooks* bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut telah menghasilkan 25 buku perkuliahan yang menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing-masing jurusan/prodi di 5 fakultas.

Buku perkuliahan yang berjudul **Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Struktur Akad *Tabarru'* dalam Hukum Islam)** merupakan salah satu di antara beberapa buku yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah **Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam** program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

PRAKATA


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, buku perkuliahan **Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad *Tabarru'* dalam Hukum Islam)** ini bisa hadir sebagai salah satu *supporting system* penyelenggaraan program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Buku perkuliahan **Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Struktur Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)** disusun oleh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, memiliki fungsi sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah **Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam**. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting yang meliputi;

- 1) *Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 2) *Prinsip dan Etika dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 3) *Akad Jual Beli dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 4) *Bai' al-Wafa' dan Bai' bi Tamana 'Ajl, dan Bai' al-'Inah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 5) *Akad Murabahah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 6) *Akad Salam dan Istisna' dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 7) *Akad Al-Sarf dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 8) *Akad Sewa-menyewa (Ijarah), dan Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 9) *Ju'alah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 10) *Akad Musharakah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 11) *Akad Mudharabah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*; 12) *Akad Muzarah, Mukhabarah dan Musaqah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* yang telah memberi *support* penyusunan buku ini, kepada Dr.

Terima Kasih.

[illegible]

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku
Perkuliahan “**Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad *Tabarru’ dalam Hukum Islam*)**” adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t }
2.	ب	b	ظ	z }
3.	ت	t	ع	`
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h }	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	`
14	ص	s }	ي	y
15	ض	d }		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas $\text{a} > \text{i} > \text{u}$ dan $\text{ا} > \text{ي} > \text{و}$). Bunyi hidup double (difthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “au” seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- Halaman Judul (i)
Kata Pengantar (ii – iii)
Prakata (iv)
Pedoman Transliterasi (vi)
Daftar Isi (vii)
Satuan Acara Perkuliahan (viii – xi)

ISI PAKET

- Paket 1 : *Wadi'ah* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (1 – 15)
Paket 2 : *Haq walah* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (16 – 30)
Paket 3 : *Wakalah* Beli dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (31 – 43)
Paket 4 : *Kafalah* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (44– 61)
Paket 5 : *Rahn* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (62 – 80)
Paket 6 : *Qardh* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (81– 93)
Paket 7 : *Ariyah* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (94 – 106)
Paket 8 : *Luqat'ah* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (107 – 122)
Paket 9 : *Ihya' al-Mawat* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (123 – 138)
Paket 10 : Wakaf dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (139 – 166)
Paket 11 : Hibah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (167 – 189)
Paket 12 : *Tafliṣ* dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (190 – 202)

PENUTUP

- Sistem Evaluasi dan Penilaian (203 – 205)
Daftar Pustaka (206 – 212)
CV Tim Penulis (213)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

A. PENGANTAR IDENTITAS

Nama Mata kuliah : **Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II**
 Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Islam /Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)
 Bobot : 2 sks
 Waktu : 2 x 50 menit/ Pertemuan
 Kelompok Matakuliah : Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU)

B. DISKRIPSI DAN URGENSI MATA KULIAH

Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam adalah salah satu dari kelompok Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) di Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Visi mata kuliah ini adalah sumber nilai dan pedoman bagi mahasiswa dan mahasiswi agar dalam kegiatan perekonomian dan bisnis sesuai dengan hukum ekonomi dan bisnis Islam. Sedangkan misinya adalah agar mahasiswa dan mahasiswi memahami hukum ekonomi dan bisnis Islam yang berkaitan langsung atau tidak dengan akad-akad (transaksi-transaksi), terutama yang bersifat *tabarru'*; yaitu bertransaksi semata-mata mencari kebaikan (ridha Allah).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan empiris. Dalam pendekatan teoritis akan ditekankan pada pemahaman terhadap teori-teori akad hukum ekonomi dan bisnis Islam. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada pengamatan dan analisis terhadap praktik-praktik kegiatan perekonomian dan bisnis serta akad yang diterapkan di sekitar mahasiswa dan mahasiswi

C. Urgensi

Menghadapi era globalisasi saat ini, berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang juga terus berkembang. Demikian juga berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis tersebut. Oleh karena itu mahasiswa dan mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah harus dibekali kemampuan untuk menyusun dan menganalisis berbagai transaksi tersebut secara profesional dan proporsioanal sesuai hukum Islam.

D. Standar Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menguasai akad-akad *tabarru'* (kebaikan).
2. Mahasiswa mampu menerapkan akad-akad *tabarru'* dalam Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Mahasiswa mampu membuat kontrak-kontrak *tabarru'*.

E. Kompetensi Dasar Dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi	Materi
Memahami Wadi'ah; pengertian, dasar hukum, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguraikan Wadi'ah; pengertian, dasar hukum, syarat-rukunnya, macam-macamnya, hokum menerima barang titipan, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu Menyebutkan Wadi'ah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberi contoh Wadi'ah dalam perbankan syariah. 	<i>Wadi'ah</i> ; pengertian, dasar hukum, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.
Memahami Hawalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguraikan Hawalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu menyebutkan Hawalah, 	Hawalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

perbankan syariah.	dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberikan contoh Hawalah dalam perbankan syariah.	
Memahami Wakalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	1. Mampu menguraikan Wakalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu Menyebutkan Wakalah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberikan contoh Wakalah dalam perbankan syariah. 4. Mampu membuat kontrak wakalah.	Wakalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.
Memahami Kafalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	1. Mampu menguraikan Kafalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu menyebutkan Kafalah dan Daman, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberikan contoh Kafalah dalam perbankan syariah. 4. Mampu membuat kontrak kafalah.	Kafalah; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.
Memahami Rahn; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	1. Mampu menguraikan Rahn; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu menyebutkan Rahn, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberikan contoh Rahn dalam perbankan syariah. 4. Mampu membuat kontrak rahn.	Rahn; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.
Memahami Qard; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	1. Mampu menguraikan Qard; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu menyebutkan qard; dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberikan contoh Qard dalam perbankan syariah.	Qard; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.
Memahami Ariyah, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.	1. Mampu menguraikan Ariyah, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. 2. Mampu menyebutkan Ariyah, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya. 3. Mampu memberikan contoh Ariyah dalam perbankan syariah.	Ariyah, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.
Memahami Luqatah (Barang Temuan),	1. Mampu menguraikan Luqatah (Barang Temuan), pengertian,	Luqatah (Barang Temuan), pengertian, dasar hukum,

sebagai penyanggah dan penanya, dan seterusnya. Dosen juga memiliki kesempatan untuk mencermati kesalahan konsep dan menambahkan konsep penting yang disampaikan oleh pemakalah. Makalah yang direvisi akan dikumpulkan sebagai komponen tugas pada evaluasi perkuliahan. Sedangkan, kuliah praktek berdasarkan kesadaran mahasiswa untuk berpartisipasi. Jika tidak ada yang berpartisipasi, maka dosen akan menunjuk salah seorang untuk mempraktekannya.

G. Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1	Partisipasi Kuliah	10%
2	Tugas Tugas Terstruktur (Kriteria Efektifitas Sekolah, Tugas Kuis, Artikel, tugas mind map, praktik pengembangan sekolah efektif) Bobot 40%	30%
3	Ujian Tengah Semester	20%
4	Ujian Akhir Semester	40%

Lembar Penilaian Portofolio

No	Komponen Penilaian	Nilai Akhir			
		Sangat Baik (A/4)	Baik (B/3)	Cukup (C=2)	Kurang (D=1)
1	Kelengkapan dokumen portofolio				
2	Kerapian dokumen portofolio				
3	Ketepatan dokumen portofolio				
4	Kualitas isi dokumen portofolio				
Total					
Rerata					

Lembar Penilaian Performansi

No	Indikator	Nilai
1	Kemampuan Mempresentasikan Makalah	
2	Kemampuan Mempertahankan ide dan gagasan	
3	Kemampuan penggunaan Bahasa Indonesia Baku	
4	Kemampuan merespon perbedaan pendapat	
5	Isi Makalah	
6	Keseuaian isi dengan judul makalah	
7	Teknis penulisan Karya Ilmiah	
8	Referensi	
9	Ketepatan waktu presentasi	

Paket 1
WADIAH DALAM HUKUM EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang titipan, yang dalam praktek perbankan bisa berbentuk tabungan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 1 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan *Wadi'ah*; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :

1. Menyebutkan *Wadi'ah*, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya.
2. menerapkan *Wadi'ah* dalam perbankan syariah.

2x50 menit

1. Pengertian *Wadi'ah*.
2. Dasar hukum *Wadi'ah*.
3. Tujuan *Wadi'ah*.
4. Syarat dan Rukun *Wadi'ah*.
5. Macam-macam *Wadi'ah*.
6. Aplikasi *wadi'ah* dalam perbankan syariah.

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Melakukan apersepsi tentang *wadi'ah* yang terjadi di dalam masyarakat.

1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya.
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan.
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Perbedaan ulama tersebut terletak pada perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.⁶

Dengan demikian, dapat diambil pengertian wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁷ Dengan kata lain, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya / barangnya dengan terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu. Dan menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.⁸

Dasar hukum Wadi'ah

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁹

b. Surat al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيُقِِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan

⁶ Hasan Abdullah Amin, *al-Wadi'ah al-Mashri'iyah al-Naqdiah wa istithmarayah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar-al-Shuruq, 1983), 23-31.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, 135. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Praktek ke Teori*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 65.

⁹ Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 2.

hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.¹⁰

c. Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha".¹¹

2. Al-Hadith

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبوداود والترمذى والحاكم)

Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau , dan jangan kamu menghiyanati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abu-Daud, al-Tirmizi dan al-Hakim).¹²

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه الدرقي)

Amar ibn Suaib, dari bapak dan kakeknya: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh dituntut ganti rugi”. (HR. al-Daruquthni).¹³

3. Berdasarkan Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas. Pada dasarnya penerima simpanan adalah “yad al amanah” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena factor-faktor diluar batas kemampuan).

¹⁰ Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) : 283.

¹¹ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 58.

¹² Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Sarah al-Turmuzi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz II, 380.

¹³ Imam Kabir Ali Ibnu Umar al-Daruqutni, *Sunan Ad Daruqutni* Juz II, 32.

Latihan

1. Apa pengertian *wadi'ah* ?
2. Sebutkan dasar hukum *wadi'ah* dan jelaskan !
3. Sebutkan rukun dan syarat *wadi'ah* dan jelaskan masing-masing !
4. Sebutkan macam-macam *wadi'ah* dan jelaskan !
5. Bagaimana aplikasi *wadi'ah* dalam perbankan syariah ?

Paket 2
***HAWAŁAH* DALAM HUKUM EKONOMI**
DAN BISNIS ISLAM

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang *hāwalah*, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 2 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan *Hikmah*, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :

1. Menguraikan *Hawalah*, pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syari.
2. Menyebutkan *Hawalah*, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya.

- ## Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian *Hawalah*
2. Dasar hukum *Hawalah*
3. Tujuan *Hawalah*
4. Syarat dan Rukun *Hawalah*
5. Macam-macam *Hawalah*
6. Aplikasi *Hawalah* dalam perbankan syariah

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Melakukan apersepsi tentang *hawaiah* yang terjadi didalam masyarakat.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya..

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang *Hawalah*, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang *hawalah*, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk *mind mapping*.

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi.

1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi!
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi!
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah!
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!

yang diucapkan oleh *muhiḥ* dan qabuḥ yang diucapkan oleh *muhaḥ* dan *muhaḥ ‘alaih*.¹⁸ Dalam akad ini ada enam rukun, yaitu :

- Muḥḥab* (orang yang memindahkan tanggungan hutangnya)
- Muḥḥab* *‘alaih* (pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oleh *muḥḥab*).
- Muḥḥab* (orang yang piutangnya dipindahkan).
- Muḥḥab* *biḥ* (hak yang dipindahkan yaitu hutang).
- Piutang *muḥḥab* pada *muḥḥab* *‘alaih*.
- Ṣiḡḥat* (ijab dan qabul).¹⁹

2. Syarat *Hawaiah*²⁰

- a. ~~Muhil~~ (orang yang memindahkan tanggungan hutangnya)

Muḥabbat disyaratkan harus, *pertama*, berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak), yaitu memiliki kecakapan hukum dalam bertindak.²¹ Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. *Ḥāwālah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. *Kedua*, kerelaan Muḥabbat. Ini disebabkan karena *ḥāwālah* mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Di samping itu persyaratan ini diwajibkan para fuqaha terutama terutama untuk meredam rasa kekecewaan atau ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muḥabbat ketika diadakan akad *ḥāwālah*.

- b. *Muhajir* (orang yang piutangnya dipindahkan)

Persyaratan yang berkaitan dengan Muha¹ *Pertama*, ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muha¹ *Kedua*, kerelaan dari Muha¹ karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. *Ketiga*, ia bersedia menerima akad *hawalah*.

- c. ~~Muhal~~ *'alaih* (pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oleh ~~muhal~~)

¹⁸ Ibid., 245.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 126.-127. Lihat juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat*, 246-247.

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 268.

Persyaratan yang berkaitan dengan *muhabb* 'alaih. *Pertama*, sama dengan syarat pertama bagi *muhabb* dan *muhabb* yaitu berakal dan balig. *Kedua*, kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Kerelaan (*ridha*) dari *muhabb* 'alaih menurut madhhab Hanafi merupakan keharusan. Sedangkan menurut madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad *hawaalah*, *Muhabb* 'alaih dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *hawaalah*.²² *Ketiga*, ia menerima akad *hawaalah* dalam majlis atau di luar majlis.

d. *Muhabbah* (hak yang dipindahkan yaitu hutang).

Persyaratan yang berkaitan dengan muhāb bih. *Pertama*, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari muhāb kepada muhāb. *Kedua*, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan. *Ketiga*, adanya kesamaan hutang muhāb dan muhāb 'alaih dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya.²³ Artinya, antara orang yang dihutangi dengan orang yang dilimpahi pertanggung jawaban telah sepakat dan sefaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahan fahaman.²⁴ Juga, hutang yang dipindahkannya itu merupakan hutang yang dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan masa yang akan datang.²⁵ Jika tidak sama, maka tidak sah.²⁶

e. Piutang *muhil* pada *muhil* 'alaih

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 91.

²³ Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), 279.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 102.

²⁵ Abdulrahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, (Semarang : Asy-Syifa, 1994), 357.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 223.

Menurut madhhab Hanañiyah, *hawalah* dikelompokkan menjadi dua, yaitu :²⁹

1. *Hawalah mutlaqah*

Ḥāwalah mutlaqah ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung muḥāl'alah, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara Muḥāl'alah menerima *ḥāwalah*.

Ulama selain madhhab Hanafi tidak membolehkan *hawalah* semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan hutang secara mutlak ini termasuk *kafalah mahdah* (jaminan). Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan tiga pihak, yaitu orang yang punya piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang.

2. *Hawalah muqayyadah*

Hawalah muqayyadah ini adalah jika orang yang berutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada *muhallal* 'alaih dengan mengaitkannya pada hutang *muhallal* 'alaih padanya. Inilah *hawalah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Ketiga madhhab selain madhhab Hanafi hanya membolehkan *hawalah muqayyadah* dan mensyaratkan pada *hawalah muqayyadah* agar hutang Muih kepada Muih dan hutang *muah* 'alaih harus sama, baik sifat maupun jumlahnya, kalaupun beda salah satunya, maka *hawalah* tidak sah.³⁰

Menurut Syafi'i Antonio, ada beberapa perbedaan hukum antara *ḥāwālah mutlaqah* dengan *ḥāwālah muqayyadah*. Perbedaan itu adalah sebagai berikut :³¹

1. Apabila *ḥāwālah* itu bersifat *mutlaqah*, sedangkan *muhajj* ‘*alaih*’ tidak berutang kepada *muhajj*, maka *muhajj* menagih hutang *ḥāwālah* kepada *muhajj* ‘*alaih*’. Atau *Muhajj* ‘*alaih*’ berhutang kepada *Muhajj* tanpa mengaitkan dengan hutang tersebut. *Muhajj* ‘*alaih*’ pun tidak keberatan dengan beban tambahan tersebut. Maka, *Muhajj* ‘*alaih*’ akan ditagih untuk membayar dua macam hutang sekaligus, yaitu hutang *ḥāwālah*

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 205. Lihat juga Musthafa Dib Al – Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: Hikmah, 2003).

³⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 29.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, 206-207.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³³

Syafi'i Antonio menguraikan bahwa, akad *hawalah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.³⁴

Berakhirnya Akad *Hawalah*

Akad *hāwalah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *ḥawalah*, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
3. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *ḥawalah* tersebut kepada pihak ketiga.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
6. Menurut mazhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.³⁵

Aplikasi *Hawalah* dalam Perbankan

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank,

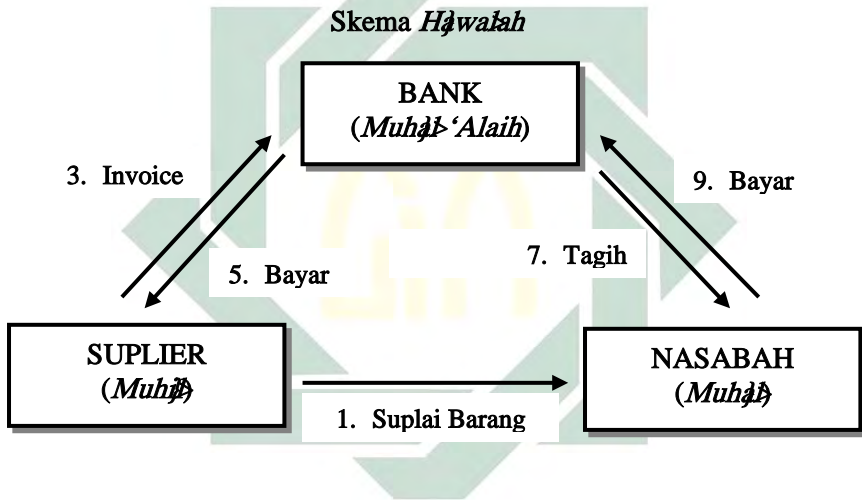
³³ Al-Our'an, 5 (al-Maidah): 2.

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 148-149

³⁵ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 225.

bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

2. *Post-date check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan hawalah. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar *fee*. Sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*.³⁶



Rangkuman

1. *Hawalah* adalah perpindahan hak membayar hutang dari *muhallif* kepada *muhallil* dalam transaksi hutang piutang.
2. Rukun *hawalah* meliputi, (a) *muhallif* dan *muhallil* disyaratkan harus memiliki kecakapan hukum dalam bertindak, yaitu berakal dan baligh dan kerelaan *muhallil*, (b) *muhallil* 'alaih, disyaratkan sebagaimana *muhallif* dan *muhallil* yaitu berakal, baligh, dan adanya kerelaan, serta , saat ia menerima akad *hawalah* dalam majlis atau di luar majlis, (c) *muhallil*-bih, disyaratkan, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari *muhallif* kepada *muhallil*, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan, dan adanya kesamaan hutang *muhallif* dan *muhallil* 'alaih dalam jenisnya, macamnya, waktu

³⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 127.

penangguhannya dan waktu pembayarannya, (d) Piutang *muhil* pada *muhil* 'alaih, disyaratkan, piutang *muhil* harus sama dengan hutang *muhil* dan piutang tersebut dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan masa yang akan datang, (e) Ijab dan qabul disyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*.

3. Ditinjau dari segi obyek akad, maka *hawalah* dapat dibagi dua, yaitu, *hawalah al-haq* dan *hawalah al-dain*. Pertama, *hawalah al-haq* adalah pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Sedangkan *hawalah ad-dain* adalah pengalihan hutang dari seorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang pada penghutang kedua. Adapun menurut Hanafi, *hawalah* ada dua macam, *hawalah mutlaqah* adalah jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung *muhallalaih*, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara *Muhallalaih* menerima *hawalah* dan *hawalah muqayyadah* ini adalah jika orang yang berutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada *muhallalaih* dengan mengaitkannya pada hutang *muhallalaih* padanya. Inilah *hawalah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Latihan

1. Apa pengertian *h_qwalah*?
2. Sebutkan dasar hukum *h_qwalah* dan jelaskan !
3. Sebutkan rukun dan syarat *h_qwalah* dan jelaskan masing-masing !
4. Sebutkan macam-macam *h_qwalah* dan jelaskan !
5. Bagaimana aplikasi *h_qwalah* dalam perbankan syariah ?

Paket 3
WAKAŁAH DALAM HUKUM EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang *wakalah*, yaitu suatu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk dikerjakan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian *wakalah*, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 3 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menjelaskan *wakalah*; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :

1. Menguraikan *wakalah*; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

- ## Lembar Kegiatan

Tujuan

Bahan dan Alat

Langkah Kegiatan

1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi!
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi!
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah!
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!

menurut al-Khalafi *wakalah* ialah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat.⁸

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang bisa diwakilkan.

Dasar hukum *Wakalah*

Islam mensyari'atkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan urusan tertentu kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Lafadz wakil muncul dalam al-Qur'an sekitar dua puluh empat kali dalam konteks dan makna yang berbeda yang inti pokoknya adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk mengatur urusan orang lain.⁹

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٥٥﴾

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan

⁸ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), 731 - 733.

⁹ Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 467.

Khaibar, lantas aku menemui Nabi SAW. Seraya beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu darinya lima belas *wasaq*” (HR. Abu Dawud).¹⁴

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوا
جاء ميمونة بنت الحارث (رواه مالك في الموطأ)

“Bahwasanya Rasulullah SAW. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harith.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).¹⁵

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW. telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *hād* dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.¹⁶

3. Ijma'

Ulama telah ijma' atas kebolehan *wakalah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis.¹⁷

4. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musharakah*), perwakilan, dan lain-lain.

¹⁴ Imam Abu Daud, *'Ain al-Ma'bud*, Juz X, (Beirut: al-Maktabah al-Salaṣiyah, t.th.), 6. Lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar-al-Fikr, t.th.), 176.

¹⁵ Anas Ibn Malik, *al-Muwat'*, Juz VI, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th.), 341.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar-al-Fikr, t.th.), 226. Lihat juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

ketika itu Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum baligh.²¹

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah, (1) persoalan tersebut dapat diwakilkan, misalnya dalam jual beli, pemindahan hutang, serikat dagang, pemberian kuasa, talak nikah atau bentuk-bentuk akad yang lain. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah,²² (2) perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan, artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar.²³

Menurut DSN-MUI sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, bahwa syarat *muwakkal fik*, adalah; (1) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, (2) tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, dan (3) dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.²⁴

d. *Sighat* (ijab dan qabul)

Shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridlaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.²⁵ Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).²⁶ Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan muwakil “aku rela mewakilkan” dan perkataan muwakil/wakil “aku telah terima” atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada masa yang akan datang dan semisal maka hal itu merupakan janji untuk beraqad tidaklah sebagai akaq yang sah secara hukum.²⁷

Macam-macam *Wakalah*

Ada beberapa macam-macam *wakalah*, antara lain:

1. Dari segi pembatasan

²¹ Ibid.,

²² Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 436.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 227.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/TV/2000 tentang Wakalah.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 235.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/TV/2000 tentang Wakalah.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 231.

orang yang mewakilkan. Menurut DSN-MUI sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, bahwa syarat *muwakkal fik* adalah; (a) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, (b) tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, dan (c) dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam, dan *Sighat* (ijab dan qabul), yang di ucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridlaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

2. Wadi'ah dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu Dari segi pembatasan, (a) *wakalah al-mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan, (b) *wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu, dan (c) *wakalah al-ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah*. Sedangkan dari segi hukum, (a) *wakalah niyabah*, yang mana orang yang mewakilkan tidak boleh melakukan improvisasi/perubahan materi yang dilakukan, (b) *wakalah wilayah*, yang mana orang yang mewakilkan boleh melakukan improvisasi materi yang dilakukan.

Latihan

1. Apa pengertian *wakalah* ?
2. Sebutkan dasar hukum *wakalah* dan jelaskan !
3. Sebutkan rukun dan syarat *wakalah* dan jelaskan masing-masing !
4. Sebutkan macam-macam *wakalah* dan jelaskan !
5. Bagaimana aplikasi *wakalah* dalam perbankan syariah ?

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya..

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang kafalah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang kafalah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk *mind mapping*.

Bahan dan Alat

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi.

Langkah Kegiatan

1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi!
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi!
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah!
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!

Uraian Materi

KAFALAH
(PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, SYARAT-RUKUNNYA,
MACAM-MACAMNYA, DAN APLIKASINYANYA DALAM
PERBANKAN SYARIAH)

Pengertian Kafalah

Kafalah menurut bahasa adalah semakna dengan kata *al-dāman* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan, dalam hal ini dikatakan *kafala fulanun fulanan*, artinya si Fulan mengumpulkan kepada Fulan.¹ Dalam bahasa arab *kafalah* merupakan definisi dari kata *kafala* (كَفَلَ) menanggung, *yakfulu* (يَكْفُلُ) *kufilan* (كُفْلَان) menjamin, *takaful* (تَكَافُل) saling menanggung, *yatakafulu* (يَتَكَافَلُونَ) *takafulan* (تَكَافُلَان) penanggung, penjamin.²

Al-Kafalah itu sendiri biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain, *damanah* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Dan pada mulanya *kafalah* merupakan pedoman kata dengan *daman* yang berarti penjaminan, namun pada perkembangan selanjutnya makna *kafalah* mengalami pergeseran. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wahdi* (personal guaranti/jaminan diri), sementara *damanah* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.³ Jika dikaitkan dengan pihak yang berketetapan/ berkewajiban atas *kafalah* (sebagai *isim fa'il*), yaitu *kafil*, maka memiliki nama lain yang lebih banyak lagi, yaitu *damin* (penjamin), *hamil* (yang menanggung beban), *za'im* (penanggung), *qabil* (penerima), dan *shabir* (orang yang tahan).⁴ Secara lebih khusus masing-masing nama tersebut ternyata punya kaitan dengan obyek *kafalah*-nya. *Damin* untuk

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 221.

² Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 1220.

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 106.

⁴ Ali<Ahmad al-Salus, *al-Kafalah wa Tatbiqatuha al-Mu'asirah*, (Kairo: Dar al-Ihtisam, 1987), 20.

obyek *kafalah* yang berskala besar, *kañil* untuk obyek yang berupa jiwa, sedangkan *sabir* untuk semua obyek *kafalah*.⁵

Sedangkan secara terminologi, konsep *kafalah* memunculkan banyak interpretasi di kalangan para ulama fiqh. Ulama Madhhab Hānafi menerangkan dalam definisi *dāman* atau *kafalah* terdapat dua pendapat, yaitu:

1. *Kafalah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang atau benda.
2. *Kafalah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.

Akan tetapi definisi yang pertama adalah lebih benar dari pada definisi yang kedua, sebab definisi yang pertama lebih umum, dan dapat meliputi macam-macam *kafalah* yang ada tiga macam. Sedangkan definisi kedua hanya terbatas pada *kafalah* hutang saja.⁶ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah *al-kafalah* adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang di jamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua.⁷

Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan obyek tanggung jawabnya. Ulama-ulama Hānafiyyah mengemukakan bahwa obyek *kafalah* tidak hanya berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama Madhhab yang lain menyatakan bahwa obyek *kafalah* tersebut berkaitan dengan harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian definisi ulama-ulama Hānafiyyah obyek *kafalah* lebih umum.⁸

Adapun menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *kafalah* ialah proses benda (materi) yang *jama'*, baik utang, barang maupun pekerjaan.⁹ Penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *asli* dalam tuntutan. Sementara ulama-ulama Syi'ah menyatakan bahwa *daman* atau *kafalah* itu bersifat pertanggungan. Artinya jika seseorang itu telah menjamin suatu

⁵ Wahbah, al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz. V, (Damaskus: Dar-al-Fikr, 1997), 78.

⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhabul Arba'ah*, 221.

⁷ Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 847.

⁸ Ibid., 847.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 174.

“Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus di bayar”. (HR. Ibnu Majah).¹⁶

حَمَلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى يَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ
فَنَامُرُكَ بِهَا قَالَ: يَأْقُبِي شَيْءٌ إِنْ الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٌ
تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَمَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (رواه مسلم)

“Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya datang dan meminta bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: “kami akan melunasi tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau berkata lagi, kami akan mengeluarkan jika ada shadaqah, lalu beliau berkara: “Ya Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan diharamkan kecuali dalam tiga hal: seseorang yang memikul suatu tanggungan, maka diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat melunasinya”.¹⁷

3. Ijma'

Menyangkut hal ini ijma ulama membolehkan *kafalah* (penjaminan) terhadap sejumlah kebutuhan manusia sebagai upaya menghindari kerugian dari orang yang berhutang. Orang-orang pada masa Nabi telah mempraktekannya, dan sampai sekarang terbukti tidak ada komplain atau pengingkaran dari umat Islam.¹⁸

Rukun dan Syarat Kafalah

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan rukun *kafalah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan asy-Syaybani, rukun *kafalah* adalah *ijab* (pernyataan penerimaan tanggung jawab dari *kafil* (penjamin) dan *qabul* (persetujuan kreditor).¹⁹

Akan tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa rukun *kafakah* itu secara lengkap adalah :²⁰

¹⁶ AbuʾAbdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazunaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 804.

¹⁷Abu-Husayn ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi (al-Naisaburi), Juz II, *Sahih al-Muslim*, (Beirut: Dar-al-Fikr, t.th.), 722

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 262. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 388.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 847.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 262.

Yaitu *kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan yang berupa harta. *Kafalah* jenis ini ada tiga macam, yaitu:²⁶

a. *Kafalah* atas hutang (*al-kafalah bi al-dain*)

Yaitu kewajiban untuk membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Hutang di sini disyaratkan:

- 1) Telah ada pada waktu jaminan tersebut diberikan apabila hutang itu belum ada ketika jaminan itu terjadi, maka kafalahnya dianggap tidak sah.
- 2) Hutang tersebut diketahui oleh penjamin.

b. *Kafalah* atas suatu barang maupun penyerahannya (*al-kafalah bi 'ain aw bi at-taslim*).

Yaitu kewajiban *kafil* untuk menyerahkan benda tertentu yang berada ditangan orang lain, seperti menyerahkan barang yang telah dijual kepada orang yang membelinya yang pada saat jual beli ternyata barang tersebut ada ditangan *gasib*. Syarat yang harus dipenuhi dalam *kafalah* ini adalah barang tersebut dijamin berada di tangan *asfil* (*makfublah*).

c. *Kafalah bi al-dark*

Dark sendiri bermakna cacat, dengan demikian maksudnya adalah *kafalah* atas barang yang telah terjual (dibeli seseorang) atas bahaya atau resiko cacat yang mungkin terjadi atas barang tersebut.

Dengan istilah yang berbeda, M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *kafalah bi al-ma'* adalah :

- a. *Kafalah bi al-taslim*, yaitu merupakan jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin penyerahan atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa. Sebagai contoh; bank mengeluarkan surat jaminan untuk nasabahnya tentang pengembalian (penyerahan) barang sewa yang disewa nasabah kepada perusahaan *leasing*.
- b. *Kafalah munjazah*, yaitu merupakan jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Sebagai contoh,

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Fiqh Muamalah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 149.

“Aku menjamin hutang anda sekarang” atau “Aku menjamin menanggulangi pendanaan proyek anda”. Atau juga Bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga bahwa nasabahnya pasti melaksanakan kewajibannya dalam mengerjakan suatu proyek.

- c. *Kafalah muqayyadah/muallaqah*, yaitu merupakan jaminan atau kafalah yang dibatasi waktunya, sebulan, setahun dan sebagainya. Sebagai contoh, bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga selama 3 bulan. Kafalah ini disebut juga *kafalah* dengan *tawqit*.²⁷

Mengambil Upah atas *Kafalah*

Akad *kafalah* yang berkembang sekarang ini, banyak yang didasari dengan adanya upah atas jasa *kafil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin orang lain. Beberapa ulama, seperti Wahbah al-Zuhaili,²⁸ menyatakan, dalam akad *kafalah* boleh diberlakukan upah atau jasa, dengan syarat bahwa *kafalah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Dibolehkannya upah atas *kafalah* tersebut adalah hanya didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat dan mendesak bagi *makful bi'anh*, sehingga kalau pemungutan upah itu tidak diperbolehkan akan semakin menyulitkannya. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah al-Zuhaili, seperti hukum bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam yang lain.²⁸

Menurut Mustafa Abdullah al-Hamsyari, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang diugaskan untuk mengadakan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap uang sogok (*risywah*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'alah*), dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sa'i al-Mirri, mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang di masukkannya pertimbangan besarnya resiko yang harus ditanggung si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.²⁹

²⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 125.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan [et.al], *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 849.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, 107.

- diklasifikasi menjadi dua macam, *al-kafalah bi al-nafs*), yaitu kew

- kafalah* ?
 hukum *kafalah* dan jelaskan !
 dan syarat *kafalah* dan jelaskan masing-masing
 m-macam *kafalah* dan jelaskan !
 kasi *kafalah* dalam perbankan syariah

2. Menyebutkan *rahn*, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya.
3. Memberikan contoh *rahn* dalam perbankan syariah.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian *rahn*
2. Dasar hukum *rahn*
3. Tujuan *rahn*
4. Syarat dan Rukun *rahn*
5. Macam-macam *rahn*
6. Aplikasi *rahn* dalam perbankan syariah

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Melakukan apersepsi tentang *rahn* yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁹

Rukun dan Syarat Kafalah

1. Rukun Gadai (*rahn*)

Rahn (gadai) memiliki empat unsur, yaitu *rabin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).²⁰ Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *shighat* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighat*, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.²¹ Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah :

- ʿaqid* (orang yang berakad)
- Marhun* (jaminan/borg)
- Marhun bih* (utang)
- Sighat*

2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Namun ada ulama yang lebih rinci dalam membahas tentang syarat-syarat *rahn*, sebagai berikut :

- a. *'Aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Shaf'iyyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.²²

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti *ahliyah* dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 162.

²¹ Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *et al*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 174.

²² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 162.

belum balig. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.²³

b. *Marhup bih* (utang)

Marhun biih adalah hak yang diberikan kepada *rahin*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :²⁴

1) *Marhum bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

2) *Marhabah* memungkinkan untuk dibayarkan

Jika marhu**n bih** tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya rahn.

3) Hak atas *marhum* *bi* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marḥūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah²⁵ memberikan tiga syarat bagi *marḥūn bih*.

- Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- Utang harus lazim pada waktu akad.
- Utang harus jelas dan diketahui oleh *rabin* dan *murtahin*.

c. *Marhuda* (jaminan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut boleh dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain :

- 1) Dapat diperjualbelikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 163-164

25 Ibid.

- 4) Milik *rahin*
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
 - 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- d. *Sfikat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu atau dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang. Hal ini karena, sebab rahn sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.²⁶ Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Shafi'iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.²⁷

- e. Kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah : 283.

Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur ulama selain Malikiyyah, berpendapat bahwa memegang (*al-qabdh*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembalikan lagi. Sebaliknya, jika *rahn* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahn* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus memegang *marhun*.

²⁶ Ibid., 163.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 252.

Ulama Malikiyyah, berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rabin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg ditangan *rabin*, *rahn* menjadi batal. Ulama Malikiyyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat ²⁸أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Macam-macam Rahn

Terdapat 2 (dua) jenis akad *rahn* yang umumnya dikenal di dalam khazanah Islam yaitu :

1. *Rahn hiyazi*

Rahn hiyazi adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana barang sebagai jaminan (*marhun*) dalam penguasaan pemberi utang. Artinya posisi *marhun* dalam *rahn hiyazi* berada di tangan pemberi utang. Contoh, Ahmad mempunyai hutang 10 juta kepada Joko, sebagai jaminan, Ahmad menyerahkan motornya kepada Joko dan akan diambil ketika sudah lunas.

2. *Rahn takmiri* atau *rahn rasmi*

Rahn takmini atau *rahn rasmi* adalah akad *rahn* atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *râhin* sebagai penerima hutang. Untuk *rahn* jenis ini lebih familiar disebut dengan *rahn tasjili*.²⁹ Contoh, Ahmad mempunyai hutang 10 juta kepada Joko, sebagai jaminan, Ahmad menyerahkan BPKB motornya tanpa menyerahkan motornya kepada Joko dan akan diambil ketika sudah lunas. Jadi, motor tetap dalam penguasaan Ahmad.

Berakhirnya Akad Gadai (*rahn*)

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:³⁰

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 165 .

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2004), 84.

³⁰ Rachmat Syaife'i, *Fiqih Muamalah*, 178.

Jika ia tetap tidak melaksanakannya, maka hakim menjualnya dan membayarkan hutangnya.³⁸

Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang tanggungan apabila penggadai tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan tidak memberikan penjelasan kapan pembayaran akan dilakukan. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *Rakin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhuq*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *Marhuq* tersebut. Hak *murtahin* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *Marhuq* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *Rakin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *Marhuq* kurang dari jumlah utang, *Rakin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.³⁹ Uang kelebihan penjualan barang gadai adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan barang gadai).⁴⁰

Aplikasi *Rahn* dalam Perbankan Syariah

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:⁴¹

- ### 1. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba'i al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

- ## 2. Sebagai Produk Tersendiri

Dibeberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysi, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah

³⁸ Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *et al*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, 181.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 110.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 176.

⁴¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 130.

2. Rahn dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu; (a) *rahn hiyazi* adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana barang sebagai jaminan (*marhun*) dalam penguasaan pemberi utang. Artinya posisi *marhun* dalam *rahn hiyazi* berada di tangan pemberi utang, (b) *rahn takmimi* atau *rahn rasmi* adalah akad *rahn* atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *râhin* sebagai penerima hutang.

1. Apa pengertian *rahn* ?
2. Sebutkan dasar hukum *rahn* dan jelaskan !
3. Sebutkan rukun dan syarat *rahn* dan jelaskan masing-masing !
4. Sebutkan macam-macam *rahn* dan jelaskan !
5. Bagaimana aplikasi *rahn* dalam perbankan syariah ?

- ## Waktu

Materi Pokok

- ## Kegiatan Perkuliahan

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Melakukan apersepsi tentang *qardh* yang terjadi di dalam masyarakat

1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya..

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang kafalah, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang *qardh* meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk *mind mapping*.

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi.

1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi!
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi!
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah!
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!

3. Ulama Shafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.⁸
4. Ulama Hanabilah berpendapat mereka *qard* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.⁹

Dari pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa *qard* adalah perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan.

Dasar Hukum Qard}

1. Al-Qur'an
 - a. Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٥٠﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹⁰

- b. Surat al-Haḍid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹¹

⁸ Ibid., h. 288

⁹ Ibid.

¹⁰ Al-Our'an, 2 (al-Baqarah): 245.

¹¹ Ibid., 57 (al-Hadi): 11.

barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*. Sedangkan, Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *ma' mithli*. Namun, barang-barang *qimiyat* seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qardh* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.¹⁸

3. *Sighat (ijab dan qabul)*

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.¹⁹

Ijab qabul disebut juga *shahat al-'aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi 3 unsur :

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁰

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²¹

Macam-macam Qard}

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 52.

²⁰ M. Hasby as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 24.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

Aplikasi *Qard* dalam Perbankan Syariah

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardh-hasanah*.²³
4. Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).²⁴

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan ada empat hal :²⁵

1. Sebagai pinjaman talangan haji
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 133.

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007), 159.

²⁵ Ibid.

h adalah hutang piutang yang
atau hutang yang sudah jatuh tem
segera, dan (b) *duyun al-mujjalah* ada
h tempo dan tidak mesti dibayar den
qard?
hukum *qard*/dan jelaskan !
dan syarat *qard*/dan jelaskan masing
m-macam *qard*/dan jelaskan !
kasi *qard* dalam perbankan syariah ?

h adalah hutang piutang yang
atau hutang yang sudah jatuh tem
segera, dan (b) *duyun al-mujjalah* ada
h tempo dan tidak mesti dibayar den
qard?
hukum *qard*/dan jelaskan !
dan syarat *qard*/dan jelaskan masing
m-macam *qard*/dan jelaskan !
kasi *qard* dalam perbankan syariah ?

- h adalah hutang piutang yang
atau hutang yang sudah jatuh tem
segera, dan (b) *duyun al-mujjalah* ada
h tempo dan tidak mesti dibayar den
qard?
hukum *qard*/dan jelaskan !
dan syarat *qard*/dan jelaskan masing
m-macam *qard*/dan jelaskan !
kasi *qard* dalam perbankan syariah ?

Paket 7
'ARIYAH DALAM HUKUM EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang konsep Islam tentang *'ariyah*, yaitu suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian *qardh*, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 7 yang akan dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami *'ariyah*; pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-rukunnya, macam-macamnya, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :

- ## Waktu

Materi Pokok

- ## Kegiatan Perkuliahan

1. Menjelaskan kompetensi dasar.

- Kegiatan Inti (70 menit)***

- ### *Kegiatan Penutup (10 menit)*

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

- ## Lembar Kegiatan

Tujuan

Bahan dan Alat

Langkah Kegiatan

1. Kelompok yang mendapatkan tugas presentasi untuk mengambil tempat
2. Pilihlah seorang moderator dan seorang notulen untuk menulis setiap tanggapan dan pertanyaan yang muncul pada saat diskusi!
3. Kelompok mempresentasikan makalahnya
4. Diskusikan makalah yang telah dipresentasikan dengan peserta diskusi!
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok makalah!
6. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
7. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!

memberikan makna kepemilikan, sehingga orang yang meminjamkan tidak dianggap sah kecuali jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi miliknya, baik terhadap pokok barang itu sendiri maupun manfaatnya. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga pinjaman itu tidak sah diberikan oleh orang yang meminjamnya, yakni bahwa ia tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut kepada orang lain.⁸

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *'ariyah* adalah memberikan manfaat sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa, pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bertimbal balik (dua pihak), dimana pihak yang satu memberikan suatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang diterimanya. Contohnya si A meminjam mobil dari si B setelah mobil tersebut terpakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan selanjutnya si A mengembalikan mobil tersebut kepada si B.

Dengan keterangan tentang ‘ariyah tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ‘ariyah berbeda dengan *qard*}. Perbedaan antara *qard*} dengan ‘ariyah adalah:

1. Kalau qard adalah mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan milik yang berhutang yang harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti: meminjam uang.
2. Sedang kalau Ariyah, hanyalah pemberian penggunaan (manfaat) barang saja, seperti meminjam sepeda motor dan itu untuk dikembalikan lagi.⁹

Dasar Hukum 'Ariyah

1. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 329.

⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata Islam)*, (Bandung: Al-Maarif, t.th.), 75.

3. Ijma'

Rukun dan Syarat Qard}

1. *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)
2. *Musta'ir* (orang yang meminjam)
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
4. *Sighat*.

Adapun syarat-syarat yang terpenuhi dalam *'ariyah* adalah :

1. *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

¹³ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 343.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 122.

¹⁵ Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 94.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 141.

Mu'ir disyaratkan berakal sehat dan baligh, *'ariyah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.¹⁷ Karena *mu'ir* harus memiliki hak tasarruf atau memiliki *ahliyatul ada*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya tidak sah.¹⁸ Kemudian tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang *mahjur 'alaih*, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya. Dan orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat barang yang akan dipinjamkan.¹⁹

2. *Musta'ir* (yang meminjam)

Bagi *musta'ir* disyaratkan harus sudah baligh dan berakal.²⁰ Karena itu tidak sah dari orang gila dan anak yang masih dibawa umur, tetapi ulama' Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat 'ariyah melainkan cukup mumayyiz.²¹

3. *Mu'ar*(barang)

Mu'ar merupakan barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.²² Juga harus milik harus milik sendiri.²³ Bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisik yang ada. Bukan barang yang apabila dimanfaatkan habis, seperti makanan dan minuman. Dan tidak sah 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dilarang oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.²⁴

4. *Silghat*

Syarat *'ariyah* disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan, baik lafal tersebut timbul dari peminjam maupun orang yang meminjamkan.²⁵

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 249.

¹⁸ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Teremah Fathul Qorib*, 403.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 141.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 330.

²⁴ Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, 94.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 5, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 309.

Macam-macam 'Akiyah

Akad *'ariyah* dapat dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *'Ariyah Mutlaqah*

‘*Ariyah mutlaqah*’ yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak ada persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk *musta’ir* saja atau dibolehkan untuk orang lain dan tidak dijelaskan cara penggunaannya. Contohnya seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak maka *mu’ir* harus bertanggung jawab.

2. 'Akrīyah Muqayyadah

'*Arīyah muqayyadah* adalah akad meminjamkan barang yang dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya atau salah satunya. Maka *musta'ir* harus bisa menjaga batasan tersebut. Pembatasan bisa tidak berlaku apabila menyebabkan *musta'ir* tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan tersebut. Dengan demikian dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila terdapat kesulitan untuk memanfaatkannya. Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* dan *musta'ir* tentang lamanya waktu meminjam, berat/nilai barang, tempat dan jenis barang maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat *mu'ir* karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.²⁶

Meminjamkan dan Menyewakan 'Ariyah

Imam Abu-Hanifah dan Imam Malik berpendapat, bahwa peminjaman dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkannya selama penggunaannya

²⁶ Allaudin al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib Shara'i*, (Mesir: Shirkah al-Matbu'ah, t.th.), 215.

tidak menyalahi tujuan pemakaian barang tersebut.²⁷ Adapun madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali, berpendapat bahwa akad ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut. Karena itu, pemanfaatannya terbatas bagi pihak peminjam dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.²⁸

Meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal meminjamkan kepada orang lain, namun mereka sepakat bahwa peminjam tidak diperbolehkan menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain.²⁹ Alasan kelompok pertama bahwa ‘ariyah merupakan akad *ghair lazim* (tidak mengikat) karena sifatnya *tabarru’* (sukarela). Sedangkan alasan kelompok kedua, menyatakan bahwa ‘ariyah adalah akad *ibahah* bukan *tamlik*, sehingga tidak boleh dipindahtangankan.³⁰

Dengan demikian, pendapat yang *rajih* (valid) tidak boleh meminjamkan barang yang ia pinjam atau menyewakannya kepada orang lain kecuali dengan izin pemilik barang, karena pemilik barang meminjamkan barang kepadanya, bukan kepada orang lain. Mungkin saja pemilik barang tidak menyukai tindakan peminjaman itu.

Tanggungan atau Amanat terhadap Barang ‘Ariyah

Ulama' Hānafiyyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian.³¹

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang riwayatkan oleh “amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda.

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان

Tidak ada kewajiban ganti rugi bagi peminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak menyeleweng. (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Hayah, Seri Kehidupan (7), Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing, t.th.), 203.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 121.

²⁹ Ahmad Wardi Mushlih, *Fiqih Muamalah*, 474.

³⁰ Ibid.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 148.

Menurut Malikiyah, peminjam dibebani ganti rugi di dalam barang-barang yang mungkin dirahasiakan, seperti pakaian dan perhiasan, apabila pada saat hilang atau rusak tidak ada saksi. Sedangkan untuk benda yang tidak mungkin dirahasiakan, seperti binatang atau benda tetap, dan ketika hilang ada saksi, peminjam tidak dibebani ganti rugi.³² Menurut pendapat Shafi'iyah peminjam dibebani ganti rugi, apabila kerusakan karena penggunaannya tidak disetujui oleh orang yang meminjamkan, meskipun tidak ada unsur kelalaian.³³ Dan menurut pendapat Hanbaliyah, bahwa peminjam dibebani ganti rugi secara mutlak, baik penggunaannya melampaui batas atau tidak, baik ia lalai apa tidak.³⁴ Sedangkan Abu Qatadah mengemukakan bahwa apabila ia mensyaratkan kepada peminjam adanya tanggungan bila terjadi kerusakan, maka tanggungan menjadi beban peminjam. Jika tidak disyaratkan maka tanggungan tidak menjadi bebannya.³⁵

Dari pendapat beberapa Imam Madzhab kami mengambil pendapat yang valid (*rajih*) yakni wajib mengganti barang pinjaman jika rusak, baik karena kesengajaan maupun tidak. Selain itu, karena kemaslahatan barang itu diperuntukkan bagi peminjam barang bukan pemilik barang. Adanya kewajiban mengganti barang membuat peminjam menjaga barang pinjaman dengan baik.

Rangkuman

1. 'Ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis).
2. Rukun dan syarat 'ariyah , meliputi: (a) *mu'ir* disyaratkan berakal sehat dan baligh, dan tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit, (b) *musta'ir* (yang meminjam), disyaratkan harus sudah baligh dan berakal, (c) *mu'ar* (barang), disyaratkan barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, dan harus milik harus milik sendiri, dan (d) *shighat*, disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada

³² Ahmad Wardi Mushlih, *Fiqih Muamalah*, 477.

³³ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 439.

³⁴ Ibid.

³⁵ Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih 4 Madzhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 412.

3. Memberikan contoh *luqatāh* (Barang Temuan) dalam ekonomi dan bisnis syariah.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian *luqatāh*
2. Dasar hukum *luqatāh*
3. Syarat dan Rukun *luqatāh*
4. Macam-macam *luqatāh*
5. *Luqatāh* dan Permasalahannya

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Menjelaskan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Melakukan apersepsi tentang *luqatāh* yang terjadi didalam masyarakat.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya
2. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan
3. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen
5. Dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan

talinya, lalu umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya (maka berikanlah), jika tidak, maka itu terserahmu." Orang itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan kambing yang hilang?" Beliau menjawab, "Itu untukmu, untuk saudaramu atau untuk serigala." Ia bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan unta yang hilang?" Ia menjawab, "Apa urusanmu dengannya, (sesungguhnya) ia memiliki tempat airnya dan sepatu kakinya, ia bisa mendatangi tempat air dan memakan pepohonan sehingga ditemui oleh pemiliknya." (HR. Bukhari)

عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلح سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف عفتها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها

Dari Zaid bin Khālid ra., sesungguhnya Nabi SAW., ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Beliau menjawab : hendaklah engkau ketahui tempat ikatnya, kemudian hendaklah engkau beritahukan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, hendaklah engkau berikan kepadanya, jika ia tidak datang setelah satu tahun, maka terserah kepadamu.” (HR. Bukhari Muslim).

Hadith lainnya adalah dari Ali ra., bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW. membawa uang satu dinar yang ditemukan di pasar, maka Nabi SAW. bersabda :

عَرَفَهُ ثَلَاثًا فَفَعَلَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ فَقَالَ كُلُّهُ

Umumkanlah sebanyak tiga kali," maka Ali melakukannya dan tidak menemukan juga pemiliknya, lalu Beliau bersabda: "Makanlah." (HR. Abdurrazzaq dari Abu Sa'id)

Dari 'Iyad bin Himar²ra., ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُعْبِرْهُ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَهْطًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Barangsiapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia minta persaksian seorang yang adil atau orang-orang yang adil, kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka ia (pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau tidak, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. (HR. Ibn Majah).

- d. Haram, yaitu orang yang menemukan harta, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan betul bahwa dirinya tidak mampu memelihara harta tersebut.
 - e. Jai~~z~~ (mubah), yaitu jika barang yang ditemukan di bumi tak bertuan atau dijalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekkah. Didalam kasus semacam ini, seseorang diperkenankan memilih antara memungut barang itu untuk dijaga dan dimilikinya setelah diumumkan, atau membiarkannya. Namun lebih diutamakan memungutnya jika dia percaya mampu menangani berbagai persoalan yang berkenaan dengan barang tersebut.¹⁴
2. Barang temuan (luqat~~ah~~)
- a. Berupa barang yang tak bernilai

Para ulama mengatakan bila barang tersebut adalah barang yang tidak bernilai, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya, apalagi bila untuk mengembalikan atau mengumumkannya membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal.¹⁵ Misalnya, seseorang menemukan makanan di tengah jalan, maka boleh dimakan, dan seseorang menemukan sesuatu yang sepele yang tidak berkaitan erat dengan jiwa orang lain, maka boleh dipungut dan halal dimilikinya.¹⁶

لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلُهَا

- b. Barang yang tercecce yang tidak boleh dipungut, karena dapat menjaga dirinya, seperti anak binatang buas semacam biawak, atau yang kuat seperti unta dan lembu. Barang temuan jenis ini tidak boleh dipungut dan dimiliki.

- c. Selain jenis di atas, yaitu yang disyaratkan dipungut yang tujuannya untuk menjaganya untuk kepentingan pemiliknya. Dalam hal ini ada beberapa hukum seperti yang disebutkan dalam hadits berikut.¹⁷ Dari ‘Iyad bin Himar ra., ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ وَجَدَ لِقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُعِيرْهُ وَلَا يَكْتُمْ،
فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Barangsiapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia minta persaksian seorang yang adil atau orang-orang yang adil, kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka ia (pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau tidak, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. (HR. Ibn Majah).

عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ
الْلُّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ
اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَذِهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَعَضِبَ حَتَّى
احْمَرَّتْ وَجَنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَهَذَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا
وَحِذَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَرَعَى الشَّجَرَ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ
الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَحْيِكَ أَوْ لِلدَّبِّ

Dari Zaid bin Khalid al-Juhanni^{١٢٤}, dia berkata, ‘Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang menemukan emas atau perak yang tercecer. Maka beliau menjawab, ‘Umumkanlah beserta wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat tertentu orang yang mencarinya datang, maka serahkanlah ia kepadanya’. Beliau juga ditanya tentang unta yang tersesat. Maka beliau bertanya, ‘Apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan ia, karena ia mempunyai sepatu dan kantong air, ia

¹⁷ Abdullah bin Abdurrahman bin Sâlih/’Ali Bassam, “Luqathah, Harta Yang Hilang Dari Tangan Pemiliknya”, <http://almanhaj.or.id/content/2144/slash/0/luqathah-harta-yang-hilang-dari-tangan-pemiliknya/>, diakses 20 September 2013.

ruginya, atau diserahkan apa adanya kalau memang barangnya masih ada dan masih utuh.

- 5) Jika pemiliknya datang meskipun setelah berlalu sekian lama dan dia dapat menyebutkan ciri-cirinya secara cermat, maka barang yang tercecer itu tetap harus dikembalikan kepadanya.
- 6) Unta yang tersesat dan lepas, yang dengan kekuatannya ia dapat menjaga kelangsungan hidupnya, atau binatang apapun yang dapat berjalan, berlari atau terbang, maka tidak boleh dipungut, karena dengan tabiat yang dijadikan Allah pada dirinya, dapat menjaga dirinya dan kelangsungan hidupnya. Tapi jika unta berada di tempat yang sekiranya membahayakan dirinya, maka ia dapat diselamatkan dan tidak dimaksudkan untuk memungutnya.
- 7) Adapun untuk kambing, yang lebih baik setelah mengambilnya ialah memberinya makanan yang dibutuhkannya, atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya, atau tetap menahannya selama masa pengumumannya. Meninggalkannya tanpa memungutnya, sama dengan membiarkannya binasa. Jika pemiliknya datang, maka kambing itu dapat diserahkan kepadanya atau nilai penjualannya kalau memang sudah dijual. Jika pemiliknya tidak datang, maka ia menjadi milik orang yang menemukannya.

3. Barang temuan (luqatāh) di tanah Haram

Adapun luqatah (barang hilang) di tanah Haram, maka tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan selamanya, dan tidak boleh memilikinya setelah satu tahun seperti yang lainnya.²¹

Dari Ibnu ‘Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّت لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، لَا يُحْتَلَى خِلَاهَا وَلَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلَّا لِمُعَرَّبٍ.

²¹ Abd al-Azīm bin Badawī al-Khalafī, “Luqathah (Barang Temuan)”, <http://almanhaj.or.id/content/1229/slash/0/luqathah-barang-temuan/>, diakses 20 September 2013.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun setelahku, dan hanyalah di halalkan bagiku sesaat dari waktu siang. Tidak boleh dicabut ilalangnya, tidak di tebang pohonnya, tidak diusir buruannya dan tidak diambil luqathahnya kecuali bagi orang yang mengumumkannya”. (HR. Muttafaq ‘alaih).

4. Anak temuan (*al-laqit*)

Al-laqit adalah anak kecil yang ditemukan dan belum balig walaupun ia telah mampu untuk berpikir.²² Atau anak yang dibuang oleh orang tuanya di jalan.²³ Menurut Abd al-Aziz bin Badawi al-Khalafi *laqit* adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan atau tidak diketahui nasabnya.²⁴ Menurut Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *laqit* adalah anak kecil yang terlantar, tidak mempunyai orang tua atau kakek-nenek atau yang menempati keduanya.²⁵

Adapun hukum memungut *laqit* adalah fardh kifayah.²⁶ Dan menurut al-Ghazy, berdosa jika tidak ada seorangpun yang memungut dan memelihara *laqit* padahal *laqit* butuh untuk disantuni. Jika, hanya seorang saja yang tahu *laqit*, maka hukumnya menjadi wajib 'ain.²⁷

Ulama madhhab sepakat, bahwa *laqit* jika ditemukan di Negara Islam, maka *laqit* tersebut dihukumi sebagai seorang muslim, kecuali Hanafi, yang mengemukakan jika *laqit* itu ditemukan di tempat ibadah orang selain Islam (*zimmī*), maka dihukumi *zimmī*.²⁸ Dan dihukumi sebagai orang yang merdeka dimana pun ia ditemukan, karena hukum asal manusia adalah merdeka. Apabila ia membawa harta atau uang, maka ia diberi nafkah dari hartanya, kalau tidak maka nafkahnya

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rakhman, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 613.

²³ Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimashqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), 298.

²⁴ Abd al-Azīm bin Badawī al-Khalafī, “Laqīṭ (Anak Temuan)”, <http://almanhaj.or.id/content/1193/slash/0/laqiith-anak-temuan/>, diakses 20 September 2013.

²⁵ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Teremah Fathul Qorib*, 465.

²⁶ Abd al-Azīm bin Badawī<al-Khalafī, “Laqīṭ (Anak Temuan)”, <http://almanhaj.or.id/content/1193/slash/0/laqiith-anak-temuan/>, diakses 20 September 2013.

²⁷ Ibid.

²⁸ Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimashqi, *Fiqh Empat Mazhab*, 298.

diambil dari *bait al-mak*²⁹ Menurut al-Ghazy, pemanfaatan harta *laqit* tersebut harus siizin hakim (pemerintah).³⁰ Jadi tidak boleh atas inisiatif orang yang menemukan.

Rangkuman

1. Luqatāh adalah barang yang terlepas atau hilang dari pemiliknya, kemudian ditemukan oleh seseorang tanpa mengetahui pemiliknya tersebut.
2. Rukun dalam al-luqathah ada dua, yaitu orang yang menemukan (*multaqit*) dan benda atau barang yang diambil (*luqatāh*).³¹ Sedangkan syarat-syarat luqatah, sebagai berikut: (a) orang yang mengambil berstatus merdeka, baligh, (b) hendaklah ia merasa aman dengan dirinya sendiri, (c) barang yang ditemukan bisa diumumkan, (d) hendaklah tempat di mana dia menemukan barang tersebut bukan milik seseorang dan bukan negeri orang syirik, (e) bukan berada ditempat yang dilarang seperti Mekah, (f) merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat di mana barang ditemukan.
3. Macam-macam benda temuan itu ada empat, sebagai berikut: (a) benda-benda tahan lama (ما يبقى على الدوام), yaitu benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misal emas, perak dan yang lainnya, (b) benda-benda yang tidak tahan lama (ما لا يبقى على الدوام), yaitu benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misal makanan. (c) benda yang memerlukan perawatan (ما يحتاج الى النفقة), seperti kulit hewan yang perlu disamak, (d) benda yang memerlukan perbelanjaan (ما يحتاج الى المؤنة), seperti binatang ternak.

Latihan

1. Apa pengertian luqatāh ?
2. Sebutkan rukun dan syarat luqatāh dan jelaskan masing-masing !
3. Sebutkan macam-macam luqatāh dan jelaskan !

²⁹ Abd al-Azīm bin Badawī al-Khalafī, “Laqit (Anak Temuan)”, <http://almanhaj.or.id/content/1193/slash/0/laqiith-anak-temuan/>, diakses 20 September 2013.

³⁰ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Teremah Fathul Qorib*, 466.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 277.

4. Bagaimana hukum luqatah ?

dan yang lainnya.¹⁰ Defines lebih praktis dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, *ihya' al-mawat* adalah membuat tanah-tanah pertanian menjadi subur atau menjadikannya cocok untuk ditanami dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat penanaman seperti batu-batu dan rumput-rumput, membuat air keluar, menaburkan tanah-tanah yang cocok untuk ditanam, dan mendirikan pagar atau mendirikan bangunan di atasnya.¹¹

Dari pengertian di atas menunjukkan, bahwa *ihya' al-mawat* adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan.

Dasar Hukum *Ihya' al-Mawat*

Al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan atau dalil yang secara *ṣarih* menerangkan tentang *ihya' al-mawāt*, namun, beberapa ayat al-Qur'an mengisyaratkan agar manusia di muka bumi ini memanfaatkan bumi demi kelangsungan hidup manusia. Di antara ayat-ayat al-Qur'an tersebut :

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadi kan kamu pemakmurnya.¹²

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.¹³

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُوهَا

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu

¹⁰ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 144.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2004), 550.

¹² al-Qur'an, 11 (Hud): 61.

¹³ Ibid., 67 (al-Mulk): 15.

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.¹⁴

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allallah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁵

Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan *ihya' al-mawat*, meskipun ada sedikit perbedaan redaksional hadis, tapi secara substansial sama, yaitu kebolehan membuka tanah mati dan yang membuka dari secara otomatis berhak atas tanah tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ عَمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ، (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Aisyah ra., berkata: “bahwa Nabi saw telah bersabda: “siapa pun yang membangun sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia berhak memiliki tanah tersebut”. Urwah berkomentar: “Dan Umar r.a telah menetapkan kebijaksanaan ini dalam pemerintahannya”. (HR. Bukhari)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَحَاطَ
حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Hadis dari samurah bin Jundab r.a. ia berkata:”Rasulullah saw telah bersabda: “siapa pun yang membuat pagar atas sebidang tanah, maka tanah tersebut menjadi miliknya”. (HR. Abu Daud).

¹⁴ Ibid., 16 (al-Nahl): 14.

¹⁵ Ibid., 45 (al-Jasiyah): 12-13.

pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka tanah itu otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi kepada pemerintah. dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan haknya jika ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi perselisihan. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Saïd bin Zaid, bahwa Nabi SAW. bersabda: “Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya.” Abu> Hanifah berpendapat: penyuburan tanah tandus memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya disyaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (Imam) dan pengakuannya. Sedang Imam Malik membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dengan tanah yang jauh dari padanya. Jika tanah itu berdekatan, maka harus dengan izin pemerintah. Sedangkan jika jauh, maka tidak disyaratkan adanya izin, dia otomatis menjadi milik orang yang menyuburkannya.³¹

Selanjutnya, berkaitan dengan *ihya' al-mawat'* ini ulama juga berbeda tentang tanah tak bertuan yang dekat dengan pemukiman. Menurut Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah, apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu. Menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari pemerintah. Sedangkan, menurut ulama Shafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani, keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *ihya' al-mawat'*, jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang.³²

- c. Tanah yang di atasnya dijumpai peninggalan-peninggalan sejarah klasik

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar-al-Turath, t.th.), 201-202.

³² Ibn Qadamah, *al-Mughni*, Jilid V, (Riyad}: Maktabah al-Riyad} al-Hadithah, t.th.), 51. Lihat juga Zakariya al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masabik ila Mu'attai Malik*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 314.

1. Apa pengertian *ihya' al-mawat*?
2. Sebutkan rukun dan syarat *ihya' al-mawat* dan jelaskan masing-masing!
3. Sebutkan macam-macam *ihya' al-mawat* dan jelaskan !

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ حَمِيدٍ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁴

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۚ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

¹⁴ Ibid., 267.

¹⁵ Ibid., 3 (Ali Imran), 92.

¹⁶ al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 2.

hukumnya sah, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia, misalnya wakaf untuk masjid atau syi'ar Islam lainnya.⁶³

Dari beberapa pandangan ulama di atas, dapat dipahami bahwa menerima wakaf dari orang non-muslim hukumnya boleh selama untuk kebaikan atau kemaslahatan umat Islam.

4. Wakaf Tunai (*waqf al-nuqud*)

Wakaf tunai adalah wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁶⁴ Menurut pengertian yang dikemukakan oleh MUI, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-surat berharga.⁶⁵

Mengenai wakaf tunai ini, ulama berbeda pendapat yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;⁶⁶ *pertama*, tidak membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah dan sebagian ulama Shafi'iyah. Ada dua alasan, wakaf tunai dilarang; (a) uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai, (b) uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya;⁶⁷ *kedua*, membolehkan wakaf tunai. Ini adalah pendapat Imam Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, juga sebagian ulama *muta'akhirin* dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Shafi'iyah. Cara wakaf tunai adalah menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya

⁶³ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 26.

⁶⁴ Biro Perbankan Syariah BI, “Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)”, dalam *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), 97.

⁶⁵ Keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002.

⁶⁶ Ahmad Zain An Najah, "Hukum Wakaf Tunai", *kemenagkarimun.blogspot.com/2013/10/*
endang-sry-wahyu-sag-fiqh-wakaf.html, 21 September 2013.

⁶⁷ Biro Perbankan Syariah BI, "Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)", 98.

Beberapa ulama menyamakan antara hibah dengan hadiah, sebagian yang lain membedakannya. Hadiah adalah pemberian dengan tujuan menghormati orang yang diberi disamping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah.¹² Menurut Sayyid Sabiq, hibah itu sama dari segi makna dan hukumnya dengan hadiah.¹³ Adapun Muhammad al-Qal’aji membedakan, hibah merupakan pemberian murni tanpa imbalan, sedangkan hadiah tidak murni pemberian tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.¹⁴

Di samping itu, ulama yang lain memasukkan shadaqah ke dalam hibah, seperti Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, dengan menyebut, shadaqah adalah menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.¹⁵ Kemudian, Hasbi Ash-Siddieqy menyebut wasiyat sebagai hibah. Wasiyat menurutnya adalah suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.¹⁶

Dari beberapa defines tersebut, maka dapat dibedakan antara hibah, hadiah, shadaqah, dan hadiah, sebagai berikut:

1. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk tidak meminta imbalan atau penggantian dan dilakukan saat seseorang masih hidup, maka disebut hibah.
2. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan, maka disebut hadiah.
3. Jika pemberian itu dimaksudkan hanya untuk mengarap pahala dari Allah SWT., maka disebut shadaqah.
4. Jika pemberian itu dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan diberikan saat setelah orang yang memberi wafat, maka disebut wasiat.

¹² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 499.

¹³ Sayyid Sabiq, “Fiqhus Sunnah”, dalam *al-maktabah asy-syamilah, al-isdhar as-shami* 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 2, h. 33.

¹⁴ Muhammad Qal'aji, "Mu'jam Lugatil Fuqaha", dalam *al-maktabah asy-syamilah, al-islamiyyah* 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 1, h. 493.

¹⁵ Taqiuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th.), 323.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 107.

- d. Menurut ulama Hānafiyyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi.²⁶ Akan tetapi, ulama Malikiyyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah.²⁷
- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dalam permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hānafiyyah dan sebagian ulama Hānabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hānafiyyah, Shafi'iyah, dan ulama Hānabilah lainnya mengatakan *al-qabd* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyyah menyatakan bahwa *al-qabd* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.²⁸

Al-qabd didefinisikan sebagai tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang, menguasai barang yang diberi oleh penghibah dan menjadikan barang itu sebagai harta miliknya.²⁹

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 84.

²⁷ Abū-al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid 2, (Beirut: Dar-al-Jik 1409 H/1989), 446.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 84.

²⁹ Abu>Bakr bin Mas'ūd al-Kasani, *Badai al-Sanai' fi Tartib al-Shara'i*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 104-105.

untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁵¹

Dalam KHI pasal 210 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

3. Pencabutan Hibah

Pada dasarnya barang telah dihibahkan tidak boleh dicabut kembali, karena mencabut sesuatu yang telah diberikan adalah perbuatan yang sangat buruk.⁵²

Namun, menurut Hana'iyah, bahwa akad hibah itu tidak mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.⁵³ Pendapat mereka berdasarkan hadits Nabi SAW.:

الواهب أحق بجهته مالم يثبت منها

Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti. (HR. Ibn Majah dan al-Daruquthi)

Sedangkan, jumbuh ulama, bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, walaupun diantara suami istri atau saudara,⁵⁴ kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁵⁵ Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن ابن عباس وابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة، فيرجع فيها، الا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطوا العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ياكل فاذ شبع قاء ثم عاد في قيئه). رواه ابوداود والنسائي وابن ماجه والترمذي

Dari Ibn ‘Abbas dan Ibn ‘Umar, Nabi SAW., bersabda: Tidak boleh (tidak halal) bagi seorang yang telah memberi atau menghibahkan

⁵¹ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 118.

⁵² Thahir Abdul Muslim Suaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), 218.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: al-Fath al-‘Ilm al-‘Arabi, 2004), 1071.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Abu-al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rushd, *Bidayyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 334.

4. Bagaimana hukum hibah orang tua kepada anak ?
5. Bagaimana batasan hibah ?
6. Bagaimana hukum pencabutan hibah ?

Abu Hurairah ra., berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW., bersabda: “Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain.” (HR. Muttafaq ‘Alaihi).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَارٍ ابْتِاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ : تَصَدَّقُوا عَلَيَّ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُرَمَائِهِ : حُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

Dari Saïd al-Khudri-ra., berkata: “Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tanaman yang ia beli, sehingga ia banyak berhutang. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata,”Bersedekahlah untuknya,” maka orang-orang pun bersedekah untuknya, namun belum bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada para penagih hutang: “Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), dan tidak ada lagi selain itu”. (HR. Muslim).

وَعَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دِينٍ كَانَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)

Dari Ibn Ka'ab Ibn Malik, dari ayahnya ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. (HR. Daruquthi)

وَعَنِ عُمَرَ بْنِ خُلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلًا مَتَاعُهُ بَعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ

Dari Umar Ibn Khaldah bahwa ia berkata: Kami datang kepada Abu Hurairah ra., menanyakan tentang teman kami yang bangkrut, lalu ia berkata: Aku berikan kepadamu suatu ketetapan hukum dari Rasulullah SAW., yaitu: “Barangsiapa bangkrut atau meninggal dunia, lalu orang itu mendapatkan barangnya masih utuh, maka ia lebih berhak atas barang tersebut.” (HR. Abu Dawud).

Syarat Jatuhnya *Taflis*

mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,75	A	Lulus
81 – 85	3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,25	B+	Lulus
71 – 75	3,00	B	Lulus
66 – 70	2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,25	C	Lulus
51 – 55	2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafiz, Abi>Abbas Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah juz 2*. Beirut: Dar-al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.

Al-Jaziry>Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala>al-Madhahib al- 'Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1974.

Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*, Terj. Abu Hiyadh. Surabaya: al-Hidayah, tt.

Al-Qushairi>, Abu>Husain Muslim ibn Hajja>: *Sahih Muslim juz 11*. Beirut: Dar>al-Kutb, tt.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*.

Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad juz 4*. Beirut: Dar> al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Juz II*. al-Haramain li Taba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi>t.th).

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madhhab Shafi'i*: Jakarta: Pustaka Setia, 2000.

Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qudamah, Ibnu. *al-Mugni>Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Sabiq, Sayyiq. *Fiqh As-Sunnah Juz 12*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.

Tirmizi, Imam. *Sunan At-Tirmizi>Juz 3*. Beirut: Dar>al-Kutb, tt.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidayah Karya Agung, t.th.

- ~ 207 ~

- ~ 208 ~

- ~ 209 ~

- ~ 210 ~

- Fatw Al-Bahuti, Mansur ibn Yunus ibn Idris. *Kasasyaf Al-Qina*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1402 H.
- Al-Ghazy, Muhammad ibn Qasim *Fath al-Qarib*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhah al-'Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib Shara'i*, Juz VI. Mesit: Shirkah Matbu'ah, t.t.
- Al-Khalidi, Muhammad Aziz. *Tuhfah al-Muhflaj bi sharh al-Minha*, vol. V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Sharbini, al-Khatib. *Mugni al-Muhflaj*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujib, Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12-13-14*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. vol. 3. Semarang: Toha Putera, t.th.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, t.th.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Fauzan, "Bentu-Bentuk Kerjasama Dalam Pengolahan Lahan Pertanian & Perkebunan", <http://fauzan-suka-susu-coklat.blogspot.com/2010/12/bentu-bentuk-kerjasama-dalam-pengolahan.html>, diakses 02 Mei 2012.DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:fatwa-dsn-mui-no-no-09dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-ijarah-&catid=57:fatwa-dsn-mui, diakses 02 Mei 2012.

Ensiklopedia of Islam Vol VII hal. 991

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 237.

Binadhi, Ardito “Larangan Jual Beli Inah”, <http://muamalah-ardito.blogspot.com/2012/03/larangan-jual-beli-inah.html>, diakses 02 Mei 2012.

Ulum, Fahrul “Debitur Ketika Ketika Membeli Barang Kreditur”, <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=100> diakses 2012.



